



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja

Web Site : www.polpp.bulelengkab.go.id, Email : polpp@bulelengkab.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
B STRUKTUR ORGANISASI	2
C ISU-ISU STRATEGIS	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
B PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018-2022	12
2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	13
3. Analisis Capaian Kinerja Strategis	13
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	15
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	17
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja	17
B. REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV PENUTUP	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1. Indikator Kinerja Utama
	2. Perjanjian Kinerja
	3. Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan laporan pelaksanaan hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018-2022 yang merupakan lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2022.

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja menjadi bagian dari system pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan ada perbaikan di masa mendatang.

Singaraja, 4 JANUARI 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng



Drs. I Putu Artawan
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19611231 198603 1 225

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat berorientasi kepada visi, misi dan tujuan suatu organisasi, dengan memperhitungkan kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang/urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditetapkan Penetapan Kinerja tahun 2020.

Penetapan kinerja memuat sasaran, indicator kinerja sasaran, target yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat operasional, dengan mengacu pada Renstra 2018-2022 dan Rencana Kerja tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2018-2022 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 1 (satu) pernyataan Misi yang diemban, serta 2 (dua) tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2020.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran di bidang sosial antar lain :

1. Sinergitas berbagai pihak dalam mensukseskan kegiatan pelatihan dasar antara lain dari SatPolPP bidang linmas, satlinmas desa/kelurahan, polsek, koramil, kecamatan dan BPBD.
2. Penurunan pelanggaran peraturan daerah, hal ini disebabkan karena adanya pembinaan dan pengawasan yang sering dilakukan oleh instansi terkait kepada masyarakat.
3. Terhadap hal tersebut menyebabkan masyarakat sudah memahami/sadar akan hak dan kewajiban untuk membantu program pemerintah daerah dan bisa terlibat

langsung apa yang menjadi tujuan serta manfaat dan kontribusi sudah dirasakan oleh masyarakat.

4. Kesadaran masyarakat untuk melengkapi usaha/bangunan yang mereka miliki untuk melengkapi ijin-ijin yang mereka peruntukan cukup tinggi.
5. Disamping dana dan sarana, prasarana adanya regulasi yang baik koordinasi antar bidang yang baik, sosialisasi yang memadai tentang ketertiban umum terhadap masyarakat dukungan stake holder.

Meskipun pencapaian sasaran relatif berhasil, namun demikian masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi tantangan, diantaranya adalah :

1. Belum semua anggota satlinmas desa/kelurahan memiliki pakaian seragam/perlengkapan linmas terutama bagi mereka yang baru bergabung menjadi anggota satlinmas dan desa/kelurahan.
2. Belum semua anggota satlinmas pernah mengikuti pelatihan dasar, terutama bagi mereka yang baru bergabung menjadi anggota satlinmas desa/kelurahan. Jumlah anggota satlinmas desa/kelurahan se Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 5.074 orang, sedangkan kemampuan anggota untuk pelatihan dasar anggota satlinmas dalam 1 tahun anggaran hanya sebanyak 62 orang dikarenakan situasi Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sehingga menyebabkan pembatasan pelatihan dasar satlinmas.
3. Belum semua anggota satlinmas memiliki kartu anggota.
4. Pihak desa/kelurahan sulit merekrut untuk menjadi anggota satlinmas desa/kelurahan.
5. Anggota satlinmas desa/kelurahan belum mendapatkan upah/jasa sebagai anggota satlinmas.
6. Lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas menyangkut peraturan daerah, karena masih banyak masyarakat belum memahami dan mengerti.
7. Masih banyaknya warga masyarakat yang melanggar.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 tanggal, 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satpolpp mempunyai tugas pokok :

” Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ” yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang berhubungan dengan :

- a. Bidang Perlindungan Masyarakat
- b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
- c. Bidang Ketertiban Umum

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Satpolpp menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan administrasi dinas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng terdiri atas :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Eselon II/b)
2. Sekretaris (Eselon III/a) , dibantu 3 Sub Bagian :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan (Eselon IV/a)
 - b. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian (Eselon IV/a)
 - c. Sub. Bagian Keuangan (Eselon IV/a)
3. Bidang Perlindungan Masyarakat (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Pengarahan Dan Pengendalian (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat (Eselon IV/a)
 - d. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (Eselon IV/a)
4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Intelijen (Eselon IV/a)
5. Bidang Ketertiban Umum (Eselon III/b) 1, dibantu 3 Seksi :
 - a. Seksi Operasi Dan Pengendalian (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Kerjasama, Keamanan Dan Ketertiban (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Penertiban (Eselon IV/a)
6. Bidang Sumber Daya Aparatur (Eselon IIIb), dibantu 3 Seksi:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Teknis Fungsional (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Data Dan Pengembangan (Eselon IV/a)

C. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD :

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; Meningkatkan Bimbingan Pelatihan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat, Melaksanakan Peningkatan Penegakan Dan Pembinaan Peraturan Daerah / Kepala Daerah, Keputusan Dan Kebijakan Daerah Lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama 9 (*sembilan*) Kecamatan yang ada. Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Imbas dari aura reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan kehidupan social masyarakat, dimana masyarakat begitu mudah merespon suatu hal bahkan terkadang terlalu responsive. Hal ini jika tidak ada penanganan secara dini akan menimbulkan gejolak social di masyarakat. Situasi tentram dan tertib secara umum akan terwujud apabila adanya dukungan berbagai komponen masyarakat dan aparatur terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah.

Secara umum situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 selama masa Pandemi Covid -19 berlangsung kondusif, dalam hal ini Pemerintah Daerah berhasil menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Buleleng. Sehingga situasi tentram dan tertib tetap terjaga dalam kelangsungan penyelenggaraan pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat, dan tidak terjadi konflik-konflik baik yang berbasis sara, anarkisme, dan separatisme dalam kehidupan masyarakat. Selama tahun 2020 gangguan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban lebih banyak di timbulkan oleh

masalah-masalah sosial yang memegang potensi berkembang karena berhubungan dengan kehidupan perekonomian masyarakat, diantaranya adalah gangguan karena adanya gelandangan dan pengemis (gepeng) yang merupakan eksodus dari daerah lain dan pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL)

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah-masalah sosial diantaranya gelandangan dan pengemis (gepeng) dan pedagang kaki lima (PKL) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya.

Adapun peluang dimaksud adalah :

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai OPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Adanya Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- c. Adanya pedoman ataupun regulasi yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN dari Kementerian Sosial RI.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2018-2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun .

Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2022 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan pelanggaran perda yang menjadi Urusan Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Buleleng.

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dengan Visi “Terwujudnya Perlindungan Kepada Masyarakat Dan Tegaknya Peraturan Daerah/Kepala Daerah Sehingga Tercipta Ketentraman Dan Ketertiban Umum” yaitu :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan Sasaran Strategis :
 - Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif dengan target : 80%
2. Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan Sasaran Startegis:
 - Menurunnya Pelanggaran Atas Perda/Perkada, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada, dengan target: 80%
3. Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan, dengan Sasaran Startegis:
 - Terwujudnya Ketertiban Umum Di Masyarakat, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat, dengan target: 85%
 - b. Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat, dengan target: 85%

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2018- 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	80%	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	80%	Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal.
3	Terwujudnya Ketertiban Umum Di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat	85%	Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintah
		Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat	85%	

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2018- 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp) 2018-2022
Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	80%	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	8.598.158.900,00
Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	80%	Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal.	9.848.526.820,00
Terwujudnya Ketertiban Umum Di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat	85%	Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	3.298.689.200,00
	Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat	85%		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif
2	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada
3	Terwujudnya Ketertiban Umum Di Masyarakat	Terwujudnya Ketertiban Umum Di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat
			Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi :

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100%	: Sangat berhasil
Capaian kinerja >70 sd <85%	: Berhasil
Capaian kinerja >55 sd <70%	: Cukup berhasil
Capaian kinerja < 55 sd 0%	: Tidak berhasil

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018-2022 :

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2018-2022 dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%) 2018-2022	Capaian (%) 2018-2022
1.	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	80%	80%	100
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	80%	80%	100
3	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat	85%	85%	100
	Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat	85%	85%	100
	Rata-rata	-	-	100%

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022 dengan skala kriteria diperoleh rata-rata capaian kinerja 100 (200 : 2 x 100% = 100%) dengan predikat sangat berhasil .

Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	CAPAIAN IKU
1.	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif Dibagi Jumlah Linmas Desa/Kelurahan 9 Kecamatan X 100%
2.	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun Lalu Dikurangi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun Ini X 100%
3.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat Dibagi Jumlah Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat X 100%
	Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat Dibagi Jumlah Aparatur Ketertiban Umum Masyarakat X 100%

2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian 2017	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian 2019	Realisasi Capaian 2020	Realisasi Capaian 2021	Realisasi Capaian 2022
1.	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	279	558	75%	80%	-	-
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	100	70	75%	80%	-	-
3	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat	-	12	80%	85%	-	-
	Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat	-	-	80%	85%	-	-
	Rata-Rata	100%	100%	100%	100%	-	-

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2018-2020, maka rata-rata capaian kinerja dan realisasi kinerja setiap tahun 100% dengan kriteria sangat berhasil di tahun 2018-2019.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2018-2022.

Sasaran 1

“Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja selama 5 tahun dari tahun 2018-2022 yaitu :

a. Pesentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif

Realisasi pencapaian indikator jumlah sumber daya manusia yang memahami tentang dasar perlindungan masyarakat yang memperoleh pelatihan dasar untuk meningkatkan rasa nyaman dan aman sehingga dalam melaksanakan tugas – tugas yang diemban menjadi lancar dan aman sebesar 80%, diperoleh dari jumlah linmas yang aktif di 9 kecamatan dibagi jumlah linmas yang mendapat pelatihan dasar. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja 80% dengan target kinerja sebesar 80% diperoleh angka capaian sebesar 100%.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Sasaran 2

“Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja selama 5 tahun dari tahun 2018-2022 yaitu :

a. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada

Realisasi pencapaian indikator sasaran strategis dengan cakupan penyelesaian penegakan peraturan daerah/kepala daerah dimana kegiatan ini untuk menegakan perda – perda yang bersangkutan untuk mengetahui berapa jumlah Perda yang dilanggar dan dapat memberikan pembinaan serta teguran kepada pelanggaran perda tersebut sehingga dalam melaksanakan Penegakan Perda tersebut Satuan Polisi

Pamong Praja berkerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tim Yustisi dan Pihak Instansi lainnya didasarkan hubungan fungsional dan saling membantu sebesar 80%, diperoleh dari jumlah pelanggaran yang tertangani dibagi jumlah pelanggaran tahun ini ditambah kasus pelanggaran terhutang. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja 80% dengan target kinerja sebesar 80% diperoleh angka capaian sebesar 100 %.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Sasaran 3

“Meningkatnya Ketertiban Umum Di Masyarakat”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja selama 5 tahun dari tahun 2018-2022 yaitu :

- a. **Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**
Realisasi pencapaian indikator sasaran strategis dengan cakupan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana kegiatan ini untuk mengurangi gangguan ketertiban umum di masyarakat dan dapat memberikan pembinaan serta teguran kepada pelanggaran ketertiban umum tersebut sehingga dalam melaksanakannya Satuan Polisi Pamong Praja berkerjasama dengan aparat, Pihak Instansi dan lembaga terkait didasarkan hubungan fungsional dan saling membantu sebesar 85%, diperoleh dari jumlah patroli ketertiban umum dibagi jumlah laporan masyarakat. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja 85% dengan target kinerja sebesar 85% diperoleh angka capaian sebesar 100 %.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut :

1. Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan.

- b. **Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat**

Realisasi pencapaian indikator sasaran strategis dengan Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Target sebesar 85% diperoleh dari Jumlah Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat Dibagi Jumlah Aparatur Ketertiban Umum Masyarakat X 100%

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut :

1. Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan..

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 1, 2 dan 3 adalah :

Sasaran 1:

- a. Sinergitas berbagai pihak dalam mensukseskan kegiatan pelatihan dasar antara lain dari SatPolPP bidang linmas, satlinmas desa/kelurahan, polsek, koramil, kecamatan dan BPBD.

Sasaran 2:

- a. Penurunan pelanggaran peraturan daerah, hal ini disebabkan karena adanya pembinaan dan pengawasan yang sering dilakukan oleh instansi terkait kepada masyarakat.
- b. Terhadap hal tersebut menyebabkan masyarakat sudah memahami/sadar akan hak dan kewajiban untuk membantu program pemerintah daerah dan bisa terlibat langsung apa yang menjadi tujuan serta manfaat dan kontribusi sudah dirasakan oleh masyarakat.
- c. Kesadaran masyarakat untuk melengkapi usaha/bangunan yang mereka miliki untuk melengkapi ijin-ijin yang mereka peruntukan cukup tinggi.

Sasaran 3:

- a. Disamping dana dan sarana, prasarana adanya regulasi yang baik koordinasi antar bidang yang baik, sosialisasi yang memadai tentang ketertiban umum terhadap masyarakat dukungan stake holder.

- Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 1, 2 dan 3 antara lain:

Sasaran 1:

- a. Belum semua anggota satlinmas desa/kelurahan memiliki pakaian seragam/perlengkapan linmas terutama bagi mereka yang baru bergabung menjadi anggota satlinmas dan desa/kelurahan.
- b. Belum semua anggota satlinmas pernah mengikuti pelatihan dasar, terutama bagi mereka yang baru bergabung menjadi anggota satlinmas desa/kelurahan. Jumlah anggota satlinmas desa/kelurahan se Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 5.074 orang, sedangkan kemampuan anggota untuk pelatihan dasar anggota satlinmas dalam 1 tahun anggaran hanya sebanyak 62 orang dikarenakan situasi Pandemi

Covid 19 yang melanda Indonesia sehingga menyebabkan pembatasan pelatihan dasar satlinmas.

- c. Belum semua anggota satlinmas memiliki kartu anggota.
- d. Pihak desa/kelurahan sulit merekrut untuk menjadi anggota satlinmas desa/kelurahan.
- e. Anggota satlinmas desa/kelurahan belum mendapatkan upah/jasa sebagai anggota satlinmas.

Sasaran 2:

- a. Lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas menyangkut peraturan daerah, karena masih banyak masyarakat belum memahami dan mengerti.

Sasaran 3:

- a. Masih banyaknya warga masyarakat yang melanggar.
 - b. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- Berkaitan dengan permasalahan tersebut, upaya/ alternative yang dilakukan antara lain:

Sasaran 1:

- a. Pakaian anggota satlinmas dan perlengkapan satlinmas desa/kelurahan agar dianggarkan melalui APBD desa dan anggota kelurahan.
- b. Pelaksanaan pelatihan satlinmas desa/kelurahan agar terus dilaksanakan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun untuk memenuhi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat untuk tahun 2021 agar jumlah anggota satlinmas desa/kelurahan ditambah.
- c. Pengadaan kartu anggota satlinmas desa/kelurahan bagi yang belum memiliki untuk tetap dianggarkan pada tahun 2021.
- d. Desa/kelurahan kesulitan merekrut anggota karena anggota satlinmas desa/kelurahan tidak mendapat upah/jasa
- e. Sampai saat ini belum ada landasan hukum untuk pemberian upah/jasa bagi anggota satlinmas desa/kelurahan.

Sasaran 2:

- a. Bagi instansi terkait lebih banyak melakukan sosialisasi baik melalui media cetak dan elektronik kepada masyarakat.

Sasaran 3:

- a. Melakukan pembenahan terus menerus dan melakukan patroli secara rutin.

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian Kinerja Organisasi tidak terlepas dari potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan , terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa :

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang ada yang terdiri dari staf/anggota yang terdiri dari 65 orang staf administrasi dan 107 orang anggota Sat Pol PP. Dari 186 orang pegawai pada Sat Pol PP 71 orang PNS, 6 orang tenaga harian dan 115 orang Tenaga Kontrak untuk kelancaran dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas-tugas, maka dipandang perlu menetapkan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
- b. Kurangnya tenaga PPNS sehubungan dengan perbandingan jumlah peraturan daerah dan atau peraturan bupati dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang untuk melaksanakan tindakan hukum masih belum memadai maka dibutuhkan penambahan PPNS dengan membentuk PPNS baru melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang.

2. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja .

Dari 9 Program Wajib dan 32 Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, pada dasarnya secara keseluruhan telah mendukung terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2022 .

Disamping itu ada 3 Program wajib Satuan Polisi Pamong Praja juga menyelenggarakan Program penunjang sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan wajib baik menyangkut sarana prasarana dan sumber daya yang ada dengan jumlah program sebanyak 6 program pilihan (penunjang) yang merupakan program di kesekretariatan dan bidang lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
1.	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	809.542.100,00	809.541.100,00	100
2.	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	955.039.150,00	949.376.150,00	99,41
3.	Terwujudnya Ketertiban Umum Di Masyarakat	Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	866.001.700,00	856.133.900,00	98,86

BAB IV PENUTUP

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, serta mengarah kepada pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yakni ***“TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DAN TEGAKNYA PERATURAN DAERAH/KEPALA DAERAH SEHINGGA TERCIPTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ”***.

Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Penataan ulang terhadap perancangan program dan kegiatan di tahun mendatang yang mengarah pada penanganan masalah anggota satlinmas dan Peraturan Daerah tetap menjadi prioritas utama.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini di masa mendatang.

Lampiran 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	<p>a. Alasan : Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, permendagri No. 10 tahun 2009 tentang penugasan satuan linmas dalam penanggulangan ketentraman, ketertiban dan keamanan</p> <p>b. Cara Pengukuran : Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif Dibagi Jumlah Linmas Desa/Kelurahan 9 Kecamatan X 100%</p> <p>c. Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat)</p>
2	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	<p>a. Alasan : Perda No. 6 tahun 2009 tentang ketertiban umum. Perda no. 2 tahun 2012 tentang perijinan. Perda no. 1 tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan. Perda No. 2 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Perda 2 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan. Perbub No. 61 Tahun 2012 Tentang penutupan investasi dibidang usaha industri penyulingan daun cengkeh</p> <p>b. Cara Pengukuran: Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun Lalu Dikurangi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun Ini X 100%</p> <p>c. Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Bidang Penegakan Dan Perundang-Undangan)</p>
3.	Terwujudnya Ketertiban Umum Di	Persentase Penyelesaian Gangguan	<p>a. Alasan : Permendagri no. 54 tahun 2011 tentang protap satuan polisi pamong praja dan</p>

	Masyarakat	Ketertiban Umum Masyarakat	<p>Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja.</p> <p>b. Cara Pengukuran: Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat Dibagi Jumlah Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat X 100%</p> <p>c. Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat)</p>
		Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat	<p>a. Alasan : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017</p> <p>b. Cara Pengukuran: Jumlah Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat Dibagi Jumlah Aparatur Ketertiban Umum Masyarakat X 100%</p> <p>c. Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat)</p>

Singaraja, 04 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng



Drs. I Putu Artawan
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19611231 198603 1 225

LAMPIRAN 2
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program			Anggaran	Target/Satuan	Ket
1	Meningkatnya Ketertarikan, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat yang sesuai dengan standar	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Rp809.542.100	80%	
2	Terwujudnya Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat	Kordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan			Rp886.001.700	85%	
		Persentase Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat					85%	
3	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			Rp955.039.150	80%	
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Target/Satuan	Ket
1	Meningkatnya kapasitas linmas desa/kelurahan di setiap kecamatan	Jumlah linmas tingkat desa/kelurahan yang aktif pada setiap kecamatan yang berkompeten	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp809.542.100	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp50.375.800	229 Orang	
	Terwujudnya ketertarikan, keamanan dan kenyamanan masyarakat sesuai standar	Jumlah linmas desa/kelurahan yang aktif			Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp73.487.100	5074 Orang	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp21.000.000		
2	Meningkatnya Kapasitas Aparat Penegak Perda/Perkada	Jumlah Aparat Penegak Perda/Perkada Yang Berkompeten	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp955.039.150	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp80.087.600	19 Orang	
	Terwujudnya Penegakan Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada			Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Rp82.354.500	80%	
					Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Rp252.150.450		
3	Kapasitas Aparatur Dalam Penanganan Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah Aparatur Yang Berkompeten Dalam Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp809.542.100	Pengamanan / Pengawasan Pejabat Pemerintah Daerah	Rp664.679.200	75 Orang	
	Terwujudnya Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp955.039.150	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp482.954.600	190 Kali	
			Kordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Rp886.001.700	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Rp886.001.700		
4	Meningkatnya Kemampuan Dan Keahlian Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp210.726.802	Penyelenggaraan Upacara / Hari Besar Nasional	Rp17.400.000	100%	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp87.876.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp11.584.000		

			Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp955.039.150	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Rp73.292.000	
					Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rp77.492.000	
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Pengelolaan Barang/Aset, Pengelolaan Barang/Aset, Kepagawaian, Keuangan Dan Penyusunan Laporan Anggaran Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	Persentase Pelayanan administrasi, Pengelolaan Barang/Aset, Kepagawaian, Pengelolaan Keuangan Dan Penyusunan Laporan Anggaran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp1.013.505.148	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp54.069.500	100%
			Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Rp210.726.802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp60.117.420	
			Peningkatan Disiplin aparatur	Rp125.550.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp202.032.000	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp1.715.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp15.000.000	
			Perencanaan Anggaran SKPD	Rp28.780.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp243.465.228	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp69.997.300	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp99.909.300	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penarikan Bangunan Kantor	Rp5.239.100	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp4.680.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.200.000	
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp115.527.000	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah / dalam daerah	Rp65.586.300	
					Penyediaan Jasa Administrasi Kepagawaian	Rp74.700.000	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp0	
					Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Rp21.500.000	
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp105.886.702	
					Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Rp65.940.100	
					Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Rp125.550.000	
					Pembinaan rohani dan Budaya Aparatur	Rp0	
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi SKPD	Rp1.715.100	
					Penyusunan Anggaran SKPD	Rp28.780.000	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan	Anggaran	Target/Satuan	Ket
1	Tersedianya anggaran pengerahan anggota linmas	Jumlah linmas yang dikerahkan dalam rangka hari-hari besar Nasional	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp73.487.100	62 Orang	Tugas tambahan dari kepala bidang linmas
	Terlaksananya pelatihan linmas desa/kelurahan pada setiap kecamatan	Jumlah linmas desa/kelurahan yang dilatih pada setiap kecamatan	Penyilapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp50.375.800	62 Orang	
	Tersedianya tim pelatihan linmas desa/kelurahan pada setiap kecamatan	Jumlah instansi/lembaga terkait desa/kelurahan pada setiap kecamatan			8 Instansi/Lembaga	Tugas tambahan dari kepala bidang linmas
	Tersedianya data linmas desa/kelurahan pada setiap kecamatan	Jumlah linmas desa/kelurahan pada setiap kecamatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp21.000.000	9 kecamatan/5074 Orang	
	Terlaksananya monitoring evaluasi linmas aktif desa/kelurahan pada setiap kecamatan	Jumlah laporan monitoring linmas aktif desa/kelurahan pada setiap kecamatan			9 Laporan	Tugas tambahan dari kepala bidang linmas
2	Tersedianya data pelanggaran perda/perkada	Jumlah laporan pelanggaran perda/perkada	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp90.087.600	12 Laporan	Tugas tambahan dari kepala bidang Perada
	Terlaksananya monitoring evaluasi penegakan perda/perkada	Jumlah laporan monitoring evaluasi penegakan perda/perkada			9 Laporan/12 Bulan	
	Terlaksananya pembinaan pelanggaran perda/perkada	Jumlah masyarakat/pelaku ekonomi yang dibina terkait pelanggaran perda/perkada	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Rp82.354.500	54 Kali	
	Tersedianya data aparat penegak perda/perkada	Jumlah aparat penegak perda/perkada	Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Rp252.150.450	19 Orang	
	Terlaksana pelatihan PPNS	Jumlah PPNS yang berkompeten			2 Orang	
	Tersedianya tim penegak perda/perkada	Jumlah instansi/lembaga terkait dalam perda/perkada			5 Instansi/Lembaga	
3	Terwujudnya rasa aman dan nyaman pejabat pemerintah kabupaten buleleng dan tamu VVIP	Jumlah pengamanan/pengawalan pejabat pemerintah kabupaten buleleng dan tamu VVIP	Pengamanan / Pengawalan Pejabat Pemerintah Daerah	Rp684.679.200	12 Bulan	Tugas tambahan dari kepala bidang trantib
	Terlaksananya pelatihan keterlibatan umum masyarakat	Jumlah aparat yang mendapat pelatihan keterlibatan umum masyarakat	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp462.954.600	189 Orang	Tugas tambahan dari kepala bidang trantib
	Terlaksananya kerjasama keterlibatan umum masyarakat dengan aparat terkait	Jumlah kerjasama keterlibatan umum masyarakat dengan aparat terkait			12 Bulan/Kali	
	Tersedianya laporan gangguan keterlibatan umum masyarakat	Jumlah laporan gangguan keterlibatan umum masyarakat	Penyelenggaraan Keterlibatan Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Rp886.001.700	9 Laporan	Tugas tambahan dari kepala bidang trantib
	Terlaksananya patroli keterlibatan umum masyarakat	Jumlah patroli keterlibatan umum masyarakat			190 Kali	
4	Tersedianya data pendidikan diklat tenaga aparat satpolpp	Jumlah pelaksanaan peningkatan kemampuan, kualitas sumber daya aparat satu satuan polisi pamong praja kab. Buleleng	Penyelenggaraan Upacara / Hari Besar Nasional	Rp17.400.000	12 Bulan	
			Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rp77.482.000		
	Tersedianya SDM satpolpp yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peningkatan kapasitas aparat satu satuan polisi pamong praja kabupaten buleleng yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp11.584.000	10 Orang	

	Tersedianya anggaran pelatihan dasar dan teknis fungsional satpolpp kabupaten buleleng	Jumlah data dan informasi aparatur satuan polisi pamong praja kabupaten buleleng yang belum mendapatkan pelatihan dasar dan teknis fungsional satuan polisi pamong praja di kabupaten buleleng dan di 9 kecamatan	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Rp76.292.000	250 Orang
5	Tersedianya data tentang barang/aset dan jumlah layanan kepegawaian serta administrasi perkantoran	Jumlah laporan pengelolaan barang/aset dan jumlah layanan kepegawaian yang terlayani administrasinya serta administrasi perkantoran lainnya	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp54.069.500	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp60.117.420	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp202.032.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp15.000.000	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp243.465.228	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp68.997.300	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp99.909.300	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.239.100	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp4.680.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.200.000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp115.527.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah / dalam daerah	Rp65.586.300	
			Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Rp74.700.000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp0	
			Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Rp21.500.000	
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp105.886.702	
			Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Rp65.940.100	
			Pengadaan Paklisan Kerja Lapangan	Rp125.550.000	
			Pembinaan rohani dan Budaya Aparatur	Rp0	100%
	Tersedianya data tentang pengelolaan keuangan satpolpp	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan daerah yang terselesaikan tepat waktu			
	Tersedianya data tentang pengelolaan dan penyusunan anggaran dan laporan kinerja	Jumlah pengelolaan dan penyusunan anggaran dan laporan kinerja yang terselesaikan tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi SKPD	Rp1.715.100	100%
			Penyusunan Anggaran SKPD	Rp28.780.000	

Singaraja, 04 Januari 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,
Drs. I Putu Ardiwan
NP. 19611231 196803 1 225

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Program	Anggaran (Rp)				
				TARGET KINERJA TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN		TARGET ANGGARAN TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Ketertarikan, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar	1 Persentase Umias Desa/Kelurahan Yang Aktif	%	75,00	Triwulan I	18,00	18,00	100,00	Sudah Tercapai	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 143.734.700	Triwulan I	Rp 36.701.100	Rp 36.701.100	100
					Triwulan II	37,00	37,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 42.487.100	Rp 42.487.100	100
					Triwulan III	61,00	61,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 73.487.100	Triwulan III	Rp 54.487.100	Rp 54.487.100	100
					Triwulan IV	75,00	75,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 73.487.100	Rp 73.487.100	100
2	Tewujudnya Keterlibatan Umum Masyarakat	1 Persentase Penyelesaian Gangguan Keterlibatan Umum Masyarakat	%	80,00	Triwulan I	20,00	20,00	100,00	Sudah Tercapai	Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Rp 874.040.000	Triwulan I	Rp 146.501.700	Rp 146.501.700	100
					Triwulan II	40,00	40,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 387.653.900	Rp 387.653.900	100
					Triwulan III	60,00	60,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 866.001.700	Triwulan III	Rp 577.378.900	Rp 577.378.900	100
					Triwulan IV	80,00	80,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 866.001.700	Rp 866.133.900	99
		2 Persentase Pengamanan Keterlibatan Umum Masyarakat	%	80,00	Triwulan I	20,00	20,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 720.428.000	Triwulan I	Rp 131.020.000	Rp 131.020.000	100
					Triwulan II	40,00	40,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 287.290.000	Rp 287.290.000	100
					Triwulan III	60,00	60,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 664.679.200	Triwulan III	Rp 439.179.200	Rp 439.179.200	100
					Triwulan IV	80,00	80,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 664.679.200	Rp 664.679.200	100
3	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	1 Jumlah Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	%	80,00	Triwulan I	20,00	20,00	100,00	Sudah Tercapai	Pemeliharaan Kantaribmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp 328.650.000	Triwulan I	Rp 38.158.050	Rp 38.158.050	100
					Triwulan II	40,00	40,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 92.890.450	Rp 92.890.450	100
					Triwulan III	60,00	60,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 252.150.450	Triwulan III	Rp 145.380.450	Rp 145.380.450	100
					Triwulan IV	80,00	80,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 252.150.450	Rp 248.374.450	99
TOTAL											Rp 1.856.318.450			Rp 1.842.673.650	99

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Kapasitas Unmas Desa/Kelurahan Di Setiap Kecamatan	1 Jumlah Unmas Tingkat Desa/Kelurahan Yang Aktif Pada Setiap Kecamatan Yang Berkompeten	Orang	229,00	Triwulan I	15,00	15,00	100,00	Sudah Tercapai	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 50.995.000	Triwulan I	Rp 5.600.000	Rp 5.600.000	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	30,00	30,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	45,00	45,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 21.000.000	Triwulan III	Rp 15.750.000	Rp 15.750.000	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	62,00	62,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	100	Sudah Tercapai
2	Terwujudnya Keterlaksanaan, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Sesuai Standar	2 Jumlah Unmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	Orang	5.074,00	Triwulan I	1.268,00	1.268,00	100,00	Sudah Tercapai	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 143.734.700	Triwulan I	Rp 36.701.100	Rp 36.701.100	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	2.536,00	2.536,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 42.487.100	Rp 42.487.100	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	3.804,00	3.804,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 73.487.100	Triwulan III	Rp 54.487.100	Rp 54.487.100	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	5.074,00	5.074,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 73.487.100	Rp 73.487.100	100	Sudah Tercapai
1	Kapasitas Aparatur Dalam Penanganan Keterlibatan Umum Masyarakat	1 Jumlah Aparatur Yang Berkompeten Dalam Penanganan Keterlibatan Umum Masyarakat	Orang	75,00	Triwulan I	18,00	18,00	100,00	Sudah Tercapai	Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Rp 523.700.000	Triwulan I	Rp 82.116.600	Rp 82.116.600	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	37,00	37,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 190.706.600	Rp 190.706.600	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	55,00	55,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 462.954.600	Triwulan III	Rp 295.706.600	Rp 295.706.600	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	75,00	75,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 462.954.600	Rp 461.188.100	100	Sudah Tercapai
2	Terwujudnya Keterlibatan Umum Masyarakat	2 Jumlah Pengamanan Keterlibatan Umum Masyarakat	Kali	190,00	Triwulan I	47,00	47,00	100,00	Sudah Tercapai	Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Rp 874.040.000	Triwulan I	Rp 146.501.700	Rp 146.501.700	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	94,00	94,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 387.653.900	Rp 387.653.900	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	141,00	141,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 866.001.700	Triwulan III	Rp 577.378.900	Rp 577.378.900	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	190,00	190,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 866.001.700	Rp 866.133.900	99	Sudah Tercapai
1	Meningkatnya Kapasitas Aparat Penggerak Perda/Perkada	1 Jumlah Aparat Penggerak Perda/Perkada Yang Berkompeten	Orang	19,00	Triwulan I	19,00	19,00	100,00	Sudah Tercapai	Penelahaaran Kantarntibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp 155.320.000	Triwulan I	Rp 16.749.700	Rp 16.749.700	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	19,00	19,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 35.354.500	Rp 35.354.500	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	19,00	19,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 82.354.500	Triwulan III	Rp 53.354.500	Rp 53.354.500	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	19,00	19,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 82.354.500	Rp 82.351.500	100	Sudah Tercapai
2	Terwujudnya Penegakan Perda/Perkada	2 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada	%	80,00	Triwulan I	20,00	20,00	100,00	Sudah Tercapai	Penelahaaran Kantarntibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp 328.650.000	Triwulan I	Rp 38.158.050	Rp 38.158.050	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	40,00	40,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 92.890.450	Rp 92.890.450	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	60,00	60,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 252.150.450	Triwulan III	Rp 145.390.450	Rp 145.390.450	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	80,00	80,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 252.150.450	Rp 248.374.450	99	Sudah Tercapai

1	Meningkatnya Kemampuan Dan Keahlian Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	%	100,00	Triwulan I	25,00	25,00	100,00	Sudah Tercapai	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 567.955.760	Triwulan I	Rp 35.676.000	Rp 35.676.000	100	Sudah Tercapai
						Triwulan II	50,00	50,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 74.768.000	Rp 74.768.000	100	Sudah Tercapai
						Triwulan III	75,00	75,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan III	Rp 110.768.000	Rp 110.768.000	100	Sudah Tercapai
						Triwulan IV	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 182.754.116	Rp 182.754.116	100	Sudah Tercapai
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Pengelolaan Barang/Aset, Pengelolaan Keuangan Dan Penyusunan Laporan Anggaran Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Buleleng	2	Persentase Pelayanan administrasi Pengelolaan Barang/Aset, Pengelolaan Keuangan Dan Penyusunan Laporan Anggaran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng	%	100,00	Triwulan I	25,00	25,00	100,00	Sudah Tercapai	Pelayanan Administrasi Perencanaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Perencanaan Anggaran SKPD	Rp 1.744.078.180	Triwulan I	Rp 297.198.067	Rp 297.198.067	100	Sudah Tercapai
						Triwulan II	50,00	50,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 575.260.586	Rp 575.260.586	100	Sudah Tercapai
						Triwulan III	75,00	75,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan III	Rp 916.665.454	Rp 916.665.454	100	Sudah Tercapai
						Triwulan IV	100,00	100,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 1.362.877.260	Rp 1.348.248.265	95	Sudah Tercapai
TOTAL												Rp 3.303.593.400		Rp 3.273.637.431		96	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tersedianya Data Linmas Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan	1 Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan	Kec/Ora ng	94574	Triwulan I	2,00	2,00	100,00	Sudah Tercapai	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Rp 50.986.000	Triwulan I	Rp 5.600.000	Rp 5.600.000	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	4,00	4,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	6,00	6,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 21.000.000	Triwulan III	Rp 15.750.000	Rp 15.750.000	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	9,00	9,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	100	Sudah Tercapai
2	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Linmas Aktif Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan	2 Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Linmas Aktif Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan	Laporan	9,00	Triwulan I	2,00	2,00	100,00	Sudah Tercapai	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan						Tugas Tambahan Dari Kepala Bidang Linmas
					Triwulan II	4,00	4,00	100,00	Sudah Tercapai							
					Triwulan III	6,00	6,00	100,00	Sudah Tercapai							
					Triwulan IV	9,00	9,00	100,00	Sudah Tercapai							
1	Terlaksananya Pelatihan Linmas Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan	1 Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Yang Dilatih Pada Setiap Kecamatan	Orang	62,00	Triwulan I	15,00	15,00	100,00	Sudah Tercapai	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 143.734.700	Triwulan I	Rp 36.701.100	Rp 36.701.100	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	30,00	30,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 42.487.100	Rp 42.487.100	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	45,00	45,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 73.487.100	Triwulan III	Rp 54.487.100	Rp 54.487.100	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	62,00	62,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 73.487.100	Rp 73.487.100	100	Sudah Tercapai
2	Tersedianya Tim Pelatihan Linmas Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan	2 Jumlah Instansi/Lembaga Terkait Dalam Pelatihan Linmas Desa/Kelurahan Pada Setiap Kecamatan	Instansi/ Lembaga	8,00	Triwulan I	2,00	2,00	100,00	Sudah Tercapai	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan						Tugas Tambahan Dari Kepala Bidang Linmas
					Triwulan II	2,00	2,00	100,00	Sudah Tercapai							
					Triwulan III	2,00	2,00	100,00	Sudah Tercapai							
					Triwulan IV	8,00	8,00	100,00	Sudah Tercapai							
1	Tersedianya Anggaran Penggerakan Anggota Linmas	1 Jumlah Linmas Yang Disalurkan Dalam Rangka Hari-Hari Besar Nasional	Orang	62,00	Triwulan I	15,00	15,00	100,00	Sudah Tercapai	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendal Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 89.515.000	Triwulan I	Rp 13.760.000	Rp 13.760.000	100	Sudah Tercapai
					Triwulan II	30,00	30,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan II	Rp 26.375.800	Rp 26.375.800	100	Sudah Tercapai
					Triwulan III	45,00	45,00	100,00	Sudah Tercapai		Rp 50.375.800	Triwulan III	Rp 38.375.800	Rp 38.375.800	100	Sudah Tercapai
					Triwulan IV	62,00	62,00	100,00	Sudah Tercapai			Triwulan IV	Rp 50.375.800	Rp 50.375.800	100	Sudah Tercapai
1	Terlaksananya Pelatihan Kefitiran Umum Masyarakat	1 Jumlah Aparatur Yang Mendapat Pelatihan Kefitiran Umum Masyarakat	Orang	189,00	Triwulan I	47,00	47,00	100,00	Sudah Tercapai	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencapaian Kefitiran						Tugas Tambahan Dari Kepala Bidang Tibum
					Triwulan II	94,00	94,00	100,00	Sudah Tercapai							
					Triwulan III	141,00	141,00	100,00	Sudah Tercapai							
					Triwulan IV	189,00	189,00	100,00	Sudah Tercapai							

2	Terlaksananya Kerjasama Keterlibatan Umum Masyarakat Dengan Aparat Terkait	2	Jumlah Kerjasama Keterlibatan Umum Masyarakat Dengan Aparat Terkait	Bulan/Kali	12,00	Triwulan I	3,00	3,00	100,00	Sudah Tercapai	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Dalam Teknik Pengobatan Keajaiban	Rp 523.700.000	Triwulan I	Rp 82.115.600	82.115.600	100	Sudah Tercapai
1	Tersedianya Laporan Gangguan Keterlibatan Umum Masyarakat	1	Jumlah Laporan Gangguan Keterlibatan Umum Masyarakat	Laporan	9,00	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	6,00 9,00 12,00 2,00	6,00 9,00 12,00 2,00	100,00 100,00 100,00 100,00	Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai	Penyektangan Keterlibatan Umum Seluruh Polisi Pamong Praja	Rp 462.954.600	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	Rp 190.706.600 Rp 295.706.600 Rp 462.954.600	190.706.600 295.706.600 461.188.100	100 100 100	Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Tugas Tambahan Dan Kepala Bidang Tbum
2	Terlaksananya Patroli Keterlibatan Umum Masyarakat	2	Jumlah Patroli Keterlibatan Umum Masyarakat	%	85,00	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	4,00 6,00 9,00 20,00	4,00 6,00 9,00 20,00	100,00 100,00 100,00 100,00	Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai	Penyektangan Keterlibatan Umum Seluruh Polisi Pamong Praja	Rp 874.040.000	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	Rp 387.653.900 Rp 577.378.900 Rp 866.001.700 Rp 146.501.700	387.653.900 577.378.900 866.001.700 146.501.700	100 100 100 100	Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai
1	Terwujudnya Rasa Aman Dan Nyaman Pejabat Pemerintah Kabupaten Bulung Dan Tamu VIP	1	Jumlah Pengamanan/Pengawasan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bulung Dan Tamu VIP	Bulan	12,00	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	4,00 6,00 8,00 3,00	4,00 6,00 8,00 3,00	100,00 100,00 100,00 100,00	Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai	Pengamanan/Pengawasan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bulung Dan Tamu VIP	Rp 720.428.000	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	Rp 387.653.900 Rp 577.378.900 Rp 866.001.700 Rp 131.020.000	387.653.900 577.378.900 866.001.700 131.020.000	100 100 100 100	Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai
1	Tersedianya Data Aparat Penegak Perda/Perkada	1	Jumlah Aparat Penegak Perda/Perkada	Orang	19,00	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	6,00 9,00 12,00	6,00 9,00 12,00	100,00 100,00 100,00	Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai	Pengawasan Perda/Perkada	Rp 664.679.200	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	Rp 287.290.000 Rp 438.179.200 Rp 664.679.200	287.290.000 438.179.200 664.679.200	100 100 100	Tugas Tambahan Dan Kepala Bidang Perda
2	Terlaksananya Pelatihan CPNS	2	Jumlah CPNS Yang Berkompeten	Orang	2,00	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	2,00	2,00	100,00	Sudah Tercapai	Pengawasan Perda/Perkada		Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I				Tugas Tambahan Dan Kepala Bidang Perda
3	Tersedianya Tim Penegak Perda/Perkada	3	Jumlah Instansi/Lembaga Terkait Dalam Perda/Perkada	Instansi/Lembaga	5,00	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	2,00 2,00 2,00 5,00	2,00 2,00 2,00 5,00	100,00 100,00 100,00 100,00	Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai Sudah Tercapai	Pengawasan Perda/Perkada	Rp 328.650.000	Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I	Rp 38.158.160	38.158.160	100	Sudah Tercapai

[illegible]

